

BAB III

SEJARAH KONFLIK DI MALI DAN INTERVENSI PRANCIS

Dalam bab III ini akan membahas mengenai sejarah konflik di Mali dan intervensi Prancis dalam konflik tersebut. Dengan sistematika yaitu, sejarah dinamika konflik, aktor dan pola hubungan dan gaya dan taktik berkonflik.

A. Sejarah Dinamika Konflik



Gambar 3.1: Peta konflik Mali

Sumber: <https://cdn.theatlantic.com/assets/media/mt/international/graphic-mali-conflict-area-110.jpg>)

Konflik yang terjadi di Mali tidak dengan mudah nya munculnya menjadi sebuah konflik yang di anggap darurat di lingkungan internasional.

Konflik antara Pemerintah Mali dan Kelompok pemberontak MNLA sudah di mulai sejak dahulu. Hal ini bisa di lihat setelah kebebasan dan kemerdekaan yang dirasakan Mali terlepas dari Prancis. Permasalahan pemberontakan sudah terjadi sejak 1961, satu tahun setelah kemerdekaan Mali itu sendiri. Pemberontakan itu di lakukan oleh etnis Tuareg yang menyatakan tidak setuju atas sistem pemerintahan negara Mali pada saat itu. Etnis ini adalah etnis yang sebagian besar berasal dari Azawad, Mali. Pemberontakan ini berawal tentang suatu kebijakan yang melarang etnis Tuareg untuk tinggal dan bekerja di luar wilayah Azawad, kebijakan itu di anggap mendiskriminasi etnis Tuareg yang menyebabkan pemberontakan tersebut.

Pemberontakan ini sebagai bibit awal banyaknya pemberontakan yang terjadi di Mali yang di lakukan di beberapa daerahnya. Pemberontak pertama yang di lakukan secara fisik adalah pada tahun 1963, saat itu pemberontakan masih bisa di tangani oleh pihak pemerintah yang di pimpin oleh Kapten Diby Sillas Diara. Pada saat itu juga, undang-undang mengenai darurat militer pertama kali di serukan bagi seluruh penduduk sipil untuk tidak mendekati daerah Azawad. Setelah pemberontakan tersebut belum ada lagi pemberontakan yang di anggap besar di daerah Mali karena pada awal tahun 1970 hingga akhir 1980-an daerah Mali mengalami kekeringan dan kebanyakan kejadian tersebut terjadi di Azawad yang akhirnya mengharuskan banyak nya etnis Tuareg mengungsi ke negara-negara tetangga contohnya adalah negara Libya.

Banyak dari penduduk Azawad tersebut yang pada masa pemberontak pindah ke Libya sehingga mereka di rekrut oleh militan Libya yang bernama

“*Legium Islam*”. Pada akhirnya memberikan mereka ilmu dan persenjataan untuk melakukan pemberontakan di Mali pada sekitar tahun 1991. Namun pemberontakan itu bisa di redam karena pada saat itu presiden Mali yaitu Alpha Konare memberikan otonomi yang cukup bagi Azawad yang akhirnya meredakan konflik untuk beberapa waktu. Setelah itupun pada tahun 1992 pemilu pertama di selenggarakan di Mali.

Setelah kejadian tersebut pemberontakan yang terjadi di Mali tidak terlalu intensif secara fisik, akan tetapi secara perpolitikan banyak gesekan-gesekan yang terjadi. Sehingga pada awal tahun 2006 Mali menyetujui pemberian otonomi daerah bagian daerah padang pasir utara yang cukup bagi daerah Azawad yang di tuntutan oleh etnis Tuareg. Pada sekitar tahun 2007 hingga 2009 banyak dari pasukan Tuareg yang dahulunya adalah anggota “*Legium Islam*” ikut menjadi salah satu pastisipan dalam konflik di Libya. Setelah konflik di Libya selesai pada tahun 2011 tentara-tentara “*Legium Islam*” yang berasal dari Mali khususnya daerah Azawad kembali ke daerah Azawad dan merencanakan untuk membuat negara baru yang bernawa Azawad.

Pada awal tahun 2012 tepatnya pada bulan Januari, para pemberontak dari daerah Azawad yang di sebut sebagai *National Movement for the Liberation of Azawad* (MNLA) melakukan kampanye terlebih dahulu untuk segera memberikan keputusan bahwa bagian Azawad khususnya yang di tinggali oleh etnis Tuareg untuk dibebaskan dari negara Mali. Azawad sendiri memang kebanyakan di tempati oleh etnis Tuareg tetapi Azawad sendiri adalah 60% bagian dari Mali dan kemungkinan kecil apabila pemerintah akan dengan sukarela melepaskan daerah Azawad menjadi

negara merdeka. Pada masa itu Presiden dari Mali sendiri adalah Amadou Toumani Touré, Presiden Amadou sendiri harus digulingkan oleh pihak militer Mali karena dianggap tidak menangani permasalahan dan pemberontakan yang terjadi di Azawad yang akhirnya pada bulan Maret 2012 Presiden Amadou harus menanggalkan jabatannya.

Kudeta yang dilakukan oleh pihak militer Mali dipimpin oleh Amadou Sanogo dimana mereka menyebut pergerakan atas penggulingan Presiden Mali disebut *National Committee for the Restoration of Democracy and State (CNRDR)*. Pada masa setelah penggulingan tersebut, Mali hanya memiliki Presiden dan Menteri sementara yang menjadi kurangnya kontrol pada otonomi-otonomi daerah, sementara hal ini yang dimanfaatkan oleh MNLA yang akhirnya menjadikan pemberontakan dan perlawanan yang terjadi. Dari pemberontakan yang terjadi tersebut dan kurangnya kontrol dari pemimpin pemerintahan pada masa itu, akhirnya Azawad pada 6 April 2012 jatuh di tangan MNLA. Keberhasilan yang didapatkan oleh MNLA ini sendiri dibantu oleh beberapa kelompok lain sebagai berikut ada *Islam Ansar Dine, Al-Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM)*, dan *the Movement for Unity and Jihad in west Africa (MUJAO)*. Pada awalnya kelompok-kelompok tersebut memang ingin membantu MNLA untuk dapat memerdekakan Azawad, akan tetapi dibalik bantuan tersebut Islam Ansar Dine dengan AQIM dan MUJAO ingin mengambil alih Azawad dan mengatur pemerintahan Azawad dengan hukum-hukum Islam dalam segala aspeknya (BBC, 2013). Dari kejadian tersebut untuk ke-dua kalinya MNLA harus merebut kembali Azawad dan pertempuran tersebut terjadi di Gao.

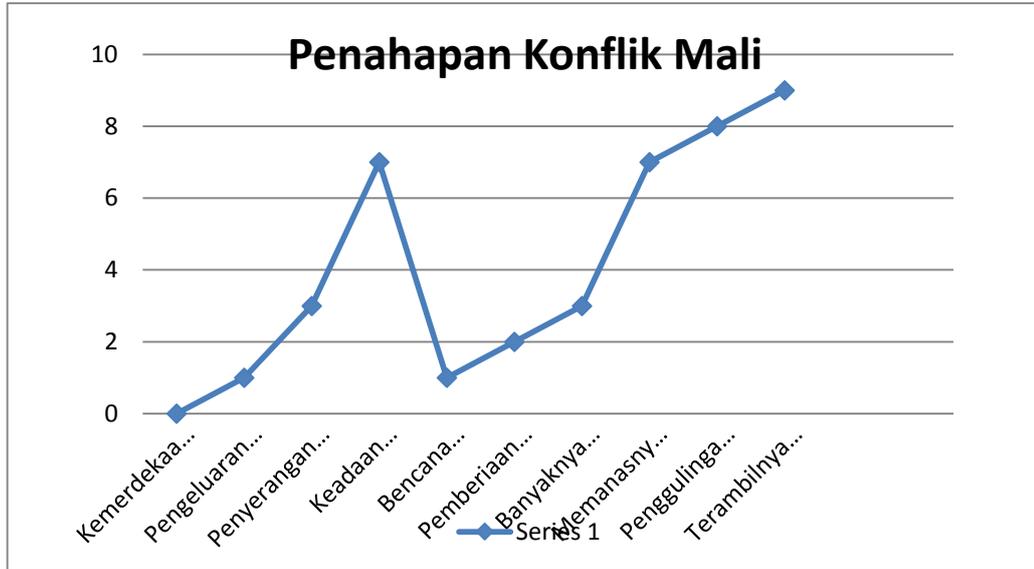
Berikut dibawah ini adalah gambar penahapan konflik di Mali, sebagai berikut;

a. Kemerdekaan Mali

Mali sebenarnya adalah sebuah negara bekas jajahan Prancis. Mali merdeka pada tahun 1960, bagi Prancis pada masa itu kemerdekaan Mali adalah tanggal 20 Juni akan tetapi Mali mendeklarasikan kemerdekaan nya pada tanggal 22 September. Hingga pada akhirnya kapan pastinya akhirnya Prancis mengakui kemerdekaan Mali yaitu tanggal 22 September. Daerah kekuasaan negara Mali pun terbentang berdasarkan daerah-daerah yang dulunya merupakan bekas kerajaan Mali.

b. Pengeluaran Kebijakan

Setelah kemerdekaan tersebut akhirnya Mali mulai merancang undang-undang, hukum, serta kebijakan-kebijakan nya untuk mengatur jalan nya pemerintah. Pada akhir tahun 1960 Mali mengeluarkan kebijakan bahwa penduduk daerah Azawad di larang untuk tinggal atau mencari pekerjaan di luar daerah Azawad serta adanya kebijakan yang menurut etnis Tuareg mengancam hak kepemilikan tanah bagi mereka. Sedangkan pada masa itu penduduk Azawad mayoritas adalah etnis Tuareg. Etnis Tuareg juga merasa bahwa pemerintah Mali lebih fokus membangun daerah Barat yang mana lain adalah daerah Bamako sebagai pusat administratif negara.



Grafik 3.1: Penahapan Konflik Mali

c. Penyerangan Pertama

Setelah pengeluaran kebijakan tersebut, akhirnya etnis Tuareg melakukan penyerangan pada tahun 1963. Pada masa itu pemberontakan etnis Tuareg atau penduduk daerah Azawad pada masa itu bisa di tumpas dengan mudah oleh militer Mali yang di pimpin oleh Kapten Diby Sillas Diarra. Kekalahan pemberontak pada masa itu mungkin dikarenakan sedikitnya pasukan serta pemasokan alat tempur yang kurang memadai.

d. Darurat Militer

Setelah pemberontakan pertama yang di lakukan oleh kelompok etnis Tuareg akhirnya Mali memberlakukan keadaan Darurat Militer untuk pertama kalinya setelah merdeka. Keadaan darurat militer ini menyebabkan bagi penduduk sipil dilarang untuk memasuki daerah Mali Utara khususnya daerah Azawad hingga akibatnya penduduk Azawad merasa menjadi lebih terisolasi dari dunia luar (Morgan A.).

e. Bencana Kekeringan

Setelah pemberontakan yang terjadi pada tahun 1960-an hanya muncul beberap pemberontakan kecil yang tidak memberikan pengaruh pada kestabilan pemerintahan di Mali. Disisi lain pada awal tahun 1980-an banyak negara-negara di Afrika mengalami bencana kekeringan yang cukup panjang dan pada masa itu Mali terkena dampaknya. Khususnya daerah Utara yaitu Azawad penduduknya harus mengungsi kenegara tetangga yaitu Libya. Bencana ini baru bisa berangsur membaik saat memasuki tahun 1989-an. Hal ini menjadi suatu keuntungan bagi kelompok Legiun Islam di Libya, mereka mulai merekrut pemuda Mali yang mengungsi untuk masuk dalam kelompok Legiun Islam yang nanti menjadi seorang tentara bayaran bagi Muammar al Khadafi.

f. Pemberiaan Kekuasaan Otonomi Daerah

Setelah bencana kekeringan selesai akhirnya banyak dari penduduk yang mengungsi ke Libya akhirnya kembali pulang ke daerah Azawad dengan di bekali kemampuan militer yang mereka pelajari dari *Legium Islam* di Libya. Pada awalnya pemberontakan kecil terjadi akan tetapi bisa di redam oleh pemerintah Mali melakukan kompromi dengan memberikan kekuasaan otonomi daerah untuk daerah Azawad.

g. Banyaknya anggota MNLA yang bergabung di Libya

Pada awal tahun 2010 di Libya terjadi pemberontakan kepada rezim Khadafi, Rezim Khadafi pada masa itu dipaksa untuk menyerahkan kepemimpinan nya.Khadafi sendiri telah memimpin Libya selama 41 tahun lamanya, kepemimpinan ini adalah salah satu kepemimpinan terlama didunia tanpa ada sistem nya kerajaan atau monarki (Gunawan, 2018). Dalam pemberontakan yang terjadi di Libya ini, para pasukan pemberontakan meminta bantuan kepada para mantan pengungsi. Mantan pengungsi ini adalah pengungsi kekeringan dari Mali pada tahun 1970-an yang telah mendapat pelatihan sebelumnya di Libya.

h. Memanasnya Konflik Mali 2012

Setelah dikabarkan Presiden Khadafi di Libya akhirnya terbunuh dalam pemberontakan rezim Khadafi, akhirnya banyak tentara yang berasal dari Mali membentuk gerakan NMLA di Mali. Gerakan ini mulai melakukan penyerangan secara militer pada pemerintahan Mali keamanan yang ada di Azawad. Penyerangan ini dimulai pada tanggal 16 Januari 2012. Pada saat itu Mali perlahan-lahan mendapatkan bantuan dari kelompok islam diluar Mali yaitu AQIM dan MUJAO.

i. Penggulingan Presiden Mali

Penggulingan presiden di Mali pada saat itu karena para pihak militer menganggap bahwa Presiden

Toure tidak bisa menyelesaikan pemberontakan di Azawad (VOA, 2012). Akhirnya pada saat itu ketua dari pemberontakan penurunan Presiden Toure adalah Amadou Sanogo naik pangkat secara singkay menjadi seorang Jendral di negara Mali.

j. Terambilnya daerah Azawad

Pada awal April 2012 kelompok NMLA akhirnya bisa merebut daerah Azawad dari pemerintah Mali. Hal ini bisa terwujud karena bantuan dari kelompok AQIM dan MUJAO.

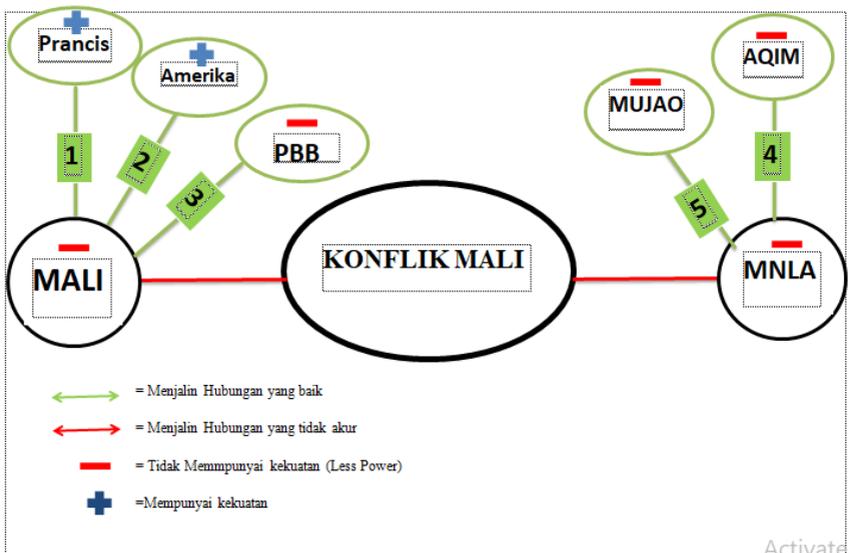
Berikut diatas adalah penjelasan singkat mengenai dinamika konflik yang terjadi di Mali. Mengenai intervensi apa saja yang dilakukan oleh Prancis di Mali akan dijelaskan pada bagian sub yang berbeda.

B. Aktor dan Pola Hubungan

Aktor yang berperan aktif dalam konflik ini pada awal kemunculan mungkin hanya sekitar dua aktor utama. Aktor tersebut adalah negara Mali serta Kelompok MNLA, akan tetapi dengan seiring nya waktu aktor yang terlibat semakin banyak salah satunya adalah negara Prancis, kelompok-kelompok berkepentingan seperti AQIM, MUJAO, bahkan Amerika pun ikut dianggap melakukan intervensi terhadap konflik Mali ini. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lebih di kenal dengan sebutan PBB di anggap mendukung atas tindakan dari salah satu aktor tersebut. Dari dua aktor utama yang terlibat dari masing-masing aktor sendiri memiliki kepentingan masing-masing yang di anggap benar satu sama lain. Seperti menurut Mali sesuai dengan peta awal daerah negara Mali sesuai dengan sejarah sebelum penjajahan Azawad adalah daerah negara Mali itu sendiri. Disisi lain kelompok MNLA menganggap bahwa kebijakan-

kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Mali tidak sama rata akhirnya menyebabkan etnis Tuareg yang hidup di sebagian besar daerah Azawad menuntut kemerdekaan atas daerah Azawad itu sendiri.

Aktor-aktor lain yang terlibat seperti Prancis, Amerika, dan kelompok-kelompok kepentingan lainnya memihak salah satu pihak dari aktor utama tersebut. Prancis dan Amerika di gambarkan berpihak kepada Pemerintah Mali dan Kelompok-kelompok AQIM, MUJAO berpihak kepada kelompok MNLA. Keberpihakan tersebut menurut mereka masing-masing itu bisa di benarkan karena perspektif kebenaran dari pihak-pihak tersebut bisa saja benar di mata mereka. Penjelasan lebih jelas mengenai keterkaitan hubungan anatar aktor-aktor tersebut akan di gambarkan dengan peta hubungan konflik di bawah ini,



Gambar 3.2: Peta Konflik Mali

Penjelasan dari peta konflik di atas:

1. Garis 1

Dalam garis 1 dalam garis ini Prancis di gambarkan sebagai aktor yang memiliki hubungan baik dengan Mali dan memiliki kekuatan yang cukup untuk menandingin MNLA. Hal ini di dasari atas hubungan yang baik antara Mali dan Prancis serta bantuan-bantuan yang di berikan oleh Prancis saat konflik ini mulai memanas (Indonesia B. , 2013).

2. Garis 2

Dalam garis 2 di gambarkan bahwa Amerika memang tidak memiliki hubungan yang begitu erat dengan negara Mali, akan tetapi Amerika memiliki hubungan yang erat dengan Prancis. Salah satu keterhubungan Prancis dan Amerika yang sangat kuat adalah tergabung nya Prancis dan Amerika dalam organisasi NATO. Sehingga keterhubungan tersebut Amerika akhirnya memberikan statement akan membantu Prancis atas intervensi nya dalam konflik Mali (Indonesia V. , AS akan Bantu Prancis di Mali, 2013).

3. Garis 3

Dalam garis 3 aktor yang terlibat ada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lebih di kenal dengan PBB. Dalam konflik ini PBB tidak secara langsung terlihat terjun dalam konflik ini, akan tetapi dalam statment di beberapa berita PBB menyatakan bahwa intervensi yang di lakukan oleh Prancis itu adalah tindakan yang seharusnya di lakukan (Indonesia V. , Sekjen PBB Dukung Intervensi di Mali, 2012).

4. Garis 4

Dalam garis 4 terlihat aktor baru yaitu kelompok AQIM, kelompok ini adalah kelompok yang terbentuk atas solidaritas agama islam. AQIM sendiri adalah kelompok cabang dari kelompok Al-Qaeda (Angelia, 2013). Kelompok ini mendatangkan bala bantuan berupa persenjataan dan tentara bantuan di Mali bagi kelompok MNLA.

5. Garis 5

Untuk garis 5 ini terdapat aktor yang hampir sama dengan dalam garis 4 yaitu kelompok MUJAO. Kelompok MUJAO ini adalah kelompok gerakan jihad di Afrika Barat. Bantuan yang di berikan pun hampir serupa berupa bantuan persenjataan dan tentara. Bantuan yang di berikan pun sebenarnya tidak terlalu bisa menandingin bantuan yang di berikan Prancis, akan tetapi cukup untuk melawan pemerintah Mali pada masa itu.

Kepentingan posisi aktor-aktor yang terlibat dalam konflik di Mali ini sebenarnya memiliki posisi nya yang berbeda satu sama lain. Salah satunya adalahnya Mali diposisikan sebagai sebuah negara yang akan terus mempertahankan kedaulatan negaranya, yaitu dengan tidak menyerah terhadap konflik ini dari tahun 1961 hingga sekarang. Posisi MNLA sebagai kelompok berkepentingan sendiri tidak mau menyerah walaupun dari semenjak tahun 1961 hingga tahun 2012 kekuatan mereka tergantung atas dukungan yang bisa di terima oleh mereka. Dua aktor tadi yaitu MNLA dan Mali memiliki kekuatan yang hampir bisa di anggap seimbang apabila mereka dibantu oleh aktor-aktor yang lain.

Mali sendiri didukung oleh Prancis dengan diberi bantuan berupa kekuatan militer tambahan pada konflik di Mali memanas pada tahun 2012. Disisi lain Amerika sebagai pihak sekutu Prancis mendukung tindakan intervensi yang di lakukan oleh Prancis, bahkan Amerika

memberikan bantuan pada Prancis untuk menjalankan intervensi tersebut. Posisi kekuatan Amerika dan Prancis sebenarnya sudah tidak bisa di ragukan kembali karena Amerika dan Prancis memiliki senjata nuklir dan dua negara tersebut adalah dua negara anggota tetap dari Dewan Keamanan PBB (Omba, 2008).

Posisi pendukung dari MNLA sendiri pada tahun 2012 memang di anggap memiliki kekuatan yang cukup kuat karena pergejolakan yang terjadi di negara-negara tetangga pada masa itu. AQIM dan MUJAWO adalah kelompok-kelompok berkepentingan berbasis islam yang memiliki keterkaitan dengan Al-Qaeda pada masa itu (Angelia, 2013). Sehingga bisa di tarik benang merah nya bahwa kemungkinan kekuatan dari kelompok AQIM dan MUJAWO itu sendiri memang didukung dan diberi bantuan oleh Al-Qaeda untuk membantu kelompok MNLA. Apabila kita menjabarkan satu persatu kekuatan dari kelompok-kelompok tersebut kelompok-kelompok tersebut akan di anggap sebagai aktor yang memiliki posisi kurang kuat dalam konflik ini.

Kepentingan para aktor utama dari konflik ini sudah jelas yaitu mempertahankan kan satu sama lain kenayakinan mereka. Mali ingin terus mempertahankan daerah kedaultan nya dan MLNA ingin memerdekakan daerah Azawad menjadi sebuah negara yang merdeka dengan menggunakan syariat hukum islam. Sedangkan kepentingan aktor-aktor yang lain adalah dengan mendukung kepentingan dari sekutu mereka. Seperti Prancis memiliki kepentingan yaitu menyakini bahwa keberadaan negara Mali sedang di pertaruhkan dan bisa mengancam kedaultan negara Mali itu sendiri. Tetapi di sisi lain Prancis memiliki rasa tanggung jawab sebagai sebuah negara yang dulu pernah menjajah atau memiliki keterkaitan dengan Prancis untuk menolong Mali (Tempo.co, 2013).

Sedangkan posisi Amerika sebagai sekutu dari negara Prancis mendukung dan memiliki tujuan yang sama dengan negara Prancis. Hal ini dianggap karena kedaulatan negara Mali sedang merasa terancam sehingga mereka memiliki rasa tanggung jawab untuk menolong negara Mali (Beritasatu, 2012).

Sedangkan kepentingan dari AQIM dan MUJAO itu sendiri bukan lain adalah dengan membantu MNLA untuk memerdekakan daerah Azawad untuk menjadi sebuah negara dengan dasar hukum Syariat Islam. Sesungguhnya kita tahu AQIM dan MUJAO adalah kelompok-kelompok yang muncul untuk untuk menegakan syariat islam di beberapa negara (Angelia, 2013).

C. Gaya dan Taktik Berkonflik

Gaya berkonflik dari aktor-aktor tersebut terbilang hampir serupa antara Mali dan kelompok MNLA. Pada awal muncul nya konflik ini hingga sebelum tahun 2012 gaya konflik dari dua aktor utama adalah Kompetisi semi kompromi. Hal ini bisa di jabarkan kaena pada awal muncul nya konflik ini aktor utama yaitu Mali dan MNLA melakukan beberapa tindakan semi militer yang bisa di anggap cukup berbahaya. Seperti MNLA melakukan pemberontakan fisik pada tahun 1965-1966 yang akhirnya menyebabkan pemerintah Mali pada masa itu melakukan tindakan gawat militer pertama kalinya setelah merdeka. Setelah kontak fisik pertama tersebut akhirnya Mali dan MNLA mulai mereda karena pada masa itu beberapa negara termasuk Mali mengalami krisis kekeringan di daratan Afrika. Setelah cukup mereda pada 1991-an kelompok MNLA di berikan tawaran dengan memberikan kekuatan otonomi daerah bagi daerah Azawad untuk mengatur daerahnya sendiri.

Setelah gaya berkonflik sebelum tahun 2012 ini akhirnya gaya berkonflik dari aktor utama berubah yaitu menjadi gaya berkonflik Kompetisi walaupun ada upaya dari aktor pihak ketiga untuk melakukan kompromi atau lebih kepada usaha *soft power*. Dimana satu sama lain menggunakan dan terus memperjuangkan kepentingan masing-masing tanpa adanya cara kompromi antara dua belah pihak.

D. Intervensi Prancis di Mali

Keterlibatan Prancis terhadap konflik di Mali ini mulai pada tahun 2013. Pada saat itu juga Presiden Francois Hollande menjabat baru sekitar 1 tahun kurang. Setelah mengetahui keadaan di Mali sedang mengalami konflik yang tidak kunjung selesai akhirnya Prancis mulai memberikan bantuan pada Mali. Bantuan-bantuan yang di berikan oleh Prancis dimulai dari bantuan militer dan resolusi-resolusi yang disetujui oleh PBB. Selama satu tahun masa konflik di Mali Prancis sudah melakukan empat gerakan resolusi yaitu resolusi 2056, 2071, dan 2085 yang terjadi pada tahun 2012 sedangkan pada tahun 2013 terjadi resolusi 2100. Tujuan empat resolusi tersebut agar konflik di Mali segera terselesaikan dan untuk mengundang respon dari negara-negara lain atas konflik di Mali.

Disisi lain keadaan di Mali semakin kacau dengan digulingkan nya Presiden Toure oleh militernya. Setelah itu dengan mudah nya kelompok NMLA yang di bantu oleh kelompok-kelompok lain akhirnya bisa merebut daerah Azawad. Setelah jatuhnya daerah Azawad yang menjadi 60% dari kekuasaan Mali jatuh ditangan NMLA, kelompo NMLA mulai memberlakukan hukum-hukum islam di daerah Azawad. Akhirnya pada tahun 2013 dimana Presiden sementara Mali yaitu Dioncounda Traore

secara jelas mengatakan bahwa Mali membutuhkan bantuan dari pihak. Hal ini dilakukan karena pemerintahan Mali sudah mulai kewalahan untuk menahan pemberontakan yang dinilai sudah mulai mendekati Bamako atau ibu kota negara Mali tersebut. Akhirnya secara gamblang Mali meminta bantuan PBB dan personal kepada Prancis untuk membantu pemerintahan Mali dalam menangani konflik tersebut.

Setelah dilihat kembali pada awalnya konflik di Mali ini adalah konflik jenis vertikal yang akhirnya berkembang menjadi sebuah konflik horizontal. Bisa dilihat kembali bahwa penyelesaian suatu konflik internal yang terjadi di sebuah negara bisa menjadi sebuah konflik yang mengikut sertakan pihak lain. Maka dari itu dalam konflik ini Prancis menjadi pihak lain tersebut yang membantu pemerintah Mali.

Pada awal konflik ini yaitu sejak tahun 2013 Prancis adalah negara pertama yang memberikan bantuan pada Mali. Prancis menjadi negara pertama yang memberikan bantuan tanpa adanya legitimasi dari PBB. Bantuan Mali pada saat itu di mulai sejak 11 Januari 2013 dengan mengirimkan pasukan militernya. Pasukan militer yang dikirimkan oleh Prancis berjumlah 550 pasukan ke Bamako sebagai ibu kota Mali dan Mopti. Setelah itu pada tanggal 14 Januari 2013 akhirnya PBB mengadakan rapat darurat atas usulan dari Prancis atas daruratnya konflik yang terjadi di Mali. Akhirnya PBB menyetujui intervensi yang terjadi di Mali yang pada awalnya hanya tentara Prancis yang berjumlah 550 tentara akhirnya meningkatkan menjadi 2500 tentara (NPR, 2013)

Tujuan pertama bantuan dari Prancis adalah agar membantu militer Mali bisa merebut kembali daerah Azawad. Pada saat itu PBB mengeluarkan resolusi pertamanya yaitu resolusi 2056 dan resolusi 2071 isi dari resolusi tersebut adalah dimana PBB meminta ECOWAS dan Uni Eropa yang merupakan organisasi

internasional ternyata mendapat respon yang sangat lambat dari organisasi tersebut. Setelah intervensi Prancis yang terbilang sedikit membuahkan hasil yaitu dengan mengusir para pemberontak untuk tidak mendekati Bamako berhasil bantuan-bantuan internasional mulai berdatangan untuk Mali.

Setelah keberhasilan tersebut Prancis dengan legitimasi dari PBB menjalankan resolusi 2100 pada 25 April 2013, dalam resolusi 2100 terdapat sebuah statement sebagai berikut;

“Welcoming the swift action by the French forces, at the request of the transitional authorities of Mali, to stop the offensive of terrorist, extremist and armed groups towards the south of Mali and commending the efforts to restore the territorial integrity of Mali by the Malian Defence and Security Forces, with the support of French forces”
(UNSC, 2).

Resolusi-resolusi yang di keluarkan oleh PBB adalah sebuah pertanda bahwa perjuangan dari Mali dan Prancis yang berusaha memperjuangkan kedaulatan Mali tidak sia-sia. PBB melihat bahwa konflik Mali ini telah menyebabkan berbagai macam masalah seperti kelaparan, kekeringan, jatuhnya korban, serta tidak adanya kedamaian bagi rakyat Mali.

Tujuan utama dari Prancis membantu Mali ini dijabarkan dalam 3 point singkat. Menghentikan serangan dari pasukan pemberontak yang perlahan-lahan mulai mendekati bagian selatan dari negara Mali. Selanjutnya adalah supaya pemerintah Mali khususnya negara Mali tetap berdiri dan tetap utuh menjadi sebuah negara merdeka yang berdaulat. Serta agar organisasi-organisasi internasional mau membantu

konflik di Mali ini seperti PBB, ECOWAS, Uni Eropa, dan Uni Afrika.

Serangan yang cukup menguncang pemberontak adalah 3 hari setelah Prancis memberikan bantuan kepada Mali. Pada tanggal 13 Januari 2013 Mali melayangkan pesawat jet Rafale kearah Gao yaitu basis untuk gudang dari logistik serta infrastruktur dan menghancurkan nya. Tujuan utamanya yaitu agar kelompok pemberontak tidak dengan mudah mendekati Bamako. Bukan hanya basis logistik dan infrastruktur yang dihancurkan oleh pemerintah Prancis menggunakan pesawat jetnya akan tetapi basis menghancurkan juga gudang amunisi Ansar Dine di Afhabo (KOMPAS, 2013). Setelah kejadian pada tanggal 13 Januari, pasukan udara Prancis akhirnya 27 Januari 2013 melakukan penyerangan kembali terhadap kota Kidal dimana menjadi tempat pemimpin pemberontakan pada saat itu Iyad Ag Ghaly (Kompas, 2013).

Setelah penyerangan terhadap kota-kota yang menjadi sarang besar dari kelompok pemberontak, militer Prancis mulai menyerang kota-kota kecil yang dianggap bisa menjadi tempat persembunyian. Kota yang diserang adalah kota Aguelhok, kota ini adalah kota perbatasan Mali dengan Aljazair. Penyerangan terhadap kota-kota yang di indikasi sebagai tempat persembunyian pemberontk tidak ada hentinya. Dalam penyerangan tersebut di curigai tokoh besar Al-Qaeda yang terkenal di Afrika Barat tewas terbunuh yaitu Abou Zeid.

Banyaknya penggunaan kekuatan militer udara Prancis karena pemberontak lebih banyak menggunakan taktik gerilya. Taktik Gerilya ini mereka gunakan karena para pemberontak lebih mengetahui medan di Mali daripada tentara Prancis. Akan tetapi Prancis juga tetap menggunakan militer udaranya karena bisanya serangan udara tidak bisa secara tepat

menyerang tujuan yang akan diserang, berbeda dengan seranangan udara yang secara tepat bisa menyerang sasaran. Sedangkan kekuatan militer laut dari Prancis hanya berfungsi sebagai pengantar bahan logistik bagi para tentara, karena letak dari negara Mali sendiri yang tidak memiliki perbatasan langsung dengan laut.

Setelah bantuan intervensi Prancis akhirnya Mali pada pertengahan tahun 2013 mulai memiliki kestabilan dalam pemerintahannya. Hal ini ditandai dengan terselenggaranya pemilihan presiden pada pada Juli putara pertama dan Agutus sebagai putaran kedua yang hasilnya terpilih presiden Ibrahim Boubacar Keita. Presiden Keita diharapkan segera bisa menstabilkan keadaan pemerintahan Mali yang selama hampir satu tahun tidak memilki Presiden yang secara langsung dipilih oleh rakyatnya.

Pada akhir tahun 2013 Prancis akhirnya dianggap berhasil menjatuhkan pasukan MNLA dan mundur untuk tidak kembali menyerang daerah Bamako. Hal ini di tunjukan kembali dengan pengurangan tentara bantaun yang pada awalnya berjumlah 4500 personil menjadi 1000 personil. Penguranagn personil tentara Prancis perlahan digantikan oleh tentara perdamaian PBB. Disisi lain tentara Prancis akan terus menjaga kedamaian di Mali untuk beberapa waktu dikarena tercantum dalam resolusi 2100 bahwa Prancis memiliki peran penting dalam perdamaian konflik di Mali.

